

## DAFTAR BACAAN

- A. Yudi Setianto, *Panduan Lengkap Mengurus Segala Dokumen*, Forum Abd. Rahman dan Baso Madiong, *Politik Hukum Pertanahan*, Celebes Media Perkasa, Makassar, 2017.
- Abdul Kadir, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996.
- Aditya Ari C (Ed.). *Konsepsi Intelektual dalam Memahami Ilmu Hukum Indonesia*, Andi Offset, Yogyakarta, 2016.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015. ,
- Dadang Sukandar, *Panduan Membuat Kontrak Bisnis*, Visimedia, Jakarta, 2017.
- Darda Syahrizal, *Kasus- Kasus Hukum Perdata di Indonesia*, Pustaka Grahatama, Yogyakarta, 2011.
- Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Frans Satriyo Wicaksono, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*, Visimedia, Jakarta, 2008.
- Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkapp Hukum Praktis Populer: Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Mengatasi Masalah Hukum Pertanahan*, Kaifa, Jakarta. 2010.
- Iswi Hariyani, *Rekontruksi dan Penghapusan Kredit Macet*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010.
- Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Visimedia, Jakarta, 2011.
- Kian Gunawan, *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah dan Property*, Best Publisher, Yogyakarta, 2009.

Much. Nurachmad, *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*, Jakarta, 2015.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.

R. Soeroso, *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis HIR, RBg, dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, 2014.

Rocky Marbun, *Cerdik dan Taktis Menghadapi Kasus Hukum*, Visimedia, Jakarta, 2010.

Sahabat, Jakarta, 2008.

Samuel M.P.H, *Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian*, Grasindo, Jakarta, 2008.

Sandrina Wijaya, *Surat Perjanjian Bisnis Langsung Deal*, Pustaka Grahatama, Yogyakarta, 2009.

Sugianto dan Leliya, *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Deepublish, Jakarta, 2017.

Sukarni, *Cyber Law : Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, Pustaka Sutra, Bandung, 2008.

Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia*, Garudhawca, Jakarta, 2015.

Tim Visi Yustisia, *KUH Perdata dan KUHA Perdata dan KUHA Perdata*, Visimedia, Jakarta, 2015.

Tim Yustisia, *Pedoman Menyusun Surat Perjanjian/ Kontrak*, Huta Publisher, Depok, 2017.

Wahyu Kuncoro, *97 Resiko Transaksi Jual Beli Property*, RAS, Jakarta, 2015.

YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, YLBHI dan AusAID, Jakarta, 2009.

Yunirman Rijan dan Ira K., *Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian / Kontrak dan Surat Penting Lainnya*, RAS, Jakarta, 2009.

Eko Yulian Isnur, *Tata Cara Mengurus Surat-Surat Rumah dan Tanah*,

### **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1958 Tentang Peralihan Tugas Dan Wewenang Agraria
4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun;
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Menjadi Undang-Undang
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.